

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto di

Jumlah uang beredar (JUB) merupakan indikator moneter yang sangat krusial dalam menentukan arah dan kestabilan perekonomian suatu negara. Secara definisi, jumlah uang beredar mencakup seluruh instrumen uang tunai dan uang giral yang berada di tangan masyarakat serta simpanan masyarakat di lembaga keuangan yang siap digunakan untuk transaksi ekonomi. Dalam konteks kebijakan makroekonomi, pengendalian JUB dilakukan melalui instrumen moneter guna menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan terciptanya sistem keuangan yang sehat dan efisien.

Perkembangan jumlah uang beredar sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi makro, seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika perekonomian tumbuh secara positif, permintaan terhadap uang sebagai alat transaksi maupun alat investasi juga cenderung meningkat. Sebaliknya, saat terjadi ketidakstabilan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan atau tekanan inflasi, masyarakat cenderung menahan likuiditas, yang pada akhirnya berdampak pada pergerakan jumlah uang beredar.

5.1.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia

Jumlah uang beredar (JUB) merupakan indikator penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, karena mencerminkan ketersediaan likuiditas di masyarakat untuk kebutuhan transaksi, investasi, dan tabungan. Dalam periode 2019 hingga 2023, JUB di Indonesia menunjukkan tren yang dinamis, seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter domestik.

Pada tahun 2020, terjadi lonjakan jumlah uang beredar akibat kebijakan moneter ekspansif Bank Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain berupa penurunan suku bunga acuan dan penyediaan stimulus likuiditas ke perbankan. Peningkatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong konsumsi serta investasi.

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 dan 2023, jumlah uang beredar terus mengalami peningkatan, mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dan naiknya permintaan uang di masyarakat. Hal ini menunjukkan peran strategis JUB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas moneter.

Tabel 5. 1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Miliar (Rp)

Tahun	Jumlah Uang Beredar	Perkembangan	Tahun	Jumlah Uang Beredar	Perkembangan
1990	84.630		2008	1.895.839	0,15%
1991	99.059	0,17%	2009	2.141.384	0,13%
1992	119.053	0,20%	2010	2.471.206	0,15%
1993	145.599	0,22%	2011	2.877.220	0,16%
1994	174.512	0,20%	2012	3.307.507	0,15%
1995	223.300	0,28%	2013	3.730.409	0,13%
1996	288.632	0,29%	2014	4.173.327	0,12%
1997	355.643	0,23%	2015	4.548.800	0,09%
1998	577.381	0,62%	2016	5.004.977	0,10%
1999	646.205	0,12%	2017	5.419.165	0,08%
2000	747.028	0,16%	2018	5.760.046	0,06%
2001	844.053	0,13%	2019	6.136.777	0,07%
2002	883.908	0,05%	2020	6.905.939	0,13%
2003	955.692	0,08%	2021	7.870.453	0,14%
2004	1.033.877	0,08%	2022	8.528.022	0,08%
2005	1.202.762	0,16%	2023	8.824.748	0,03%
2006	1.382.493	0,15%	Rata-rata		0,16%
2007	1.649.662	0,19%			

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia selama periode 1990 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 15,4%. Pada periode 1990–1996, pertumbuhan JUB mencatatkan tren positif dan stabil, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1996 sebesar 29%. Kenaikan ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di era awal liberalisasi ekonomi dan meningkatnya kegiatan konsumsi serta investasi domestik. Selain itu, ekspansi sektor industri dan perdagangan turut mendorong bertambahnya likuiditas dalam perekonomian nasional.

Tahun 1997 menandai awal krisis keuangan Asia yang menyebabkan tekanan besar pada perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, jumlah uang beredar masih menunjukkan kenaikan sebesar 23% karena adanya respons kebijakan moneter ekspansif dalam rangka menjaga likuiditas sistem keuangan nasional. Pada tahun 1998, JUB melonjak drastis hingga 62%, yang menjadi angka tertinggi sepanjang periode observasi. Lonjakan ini terjadi akibat intervensi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menyuntikkan dana ke sektor perbankan, serta akibat tekanan inflasi dan depresiasi tajam rupiah yang meningkatkan nilai nominal uang beredar.

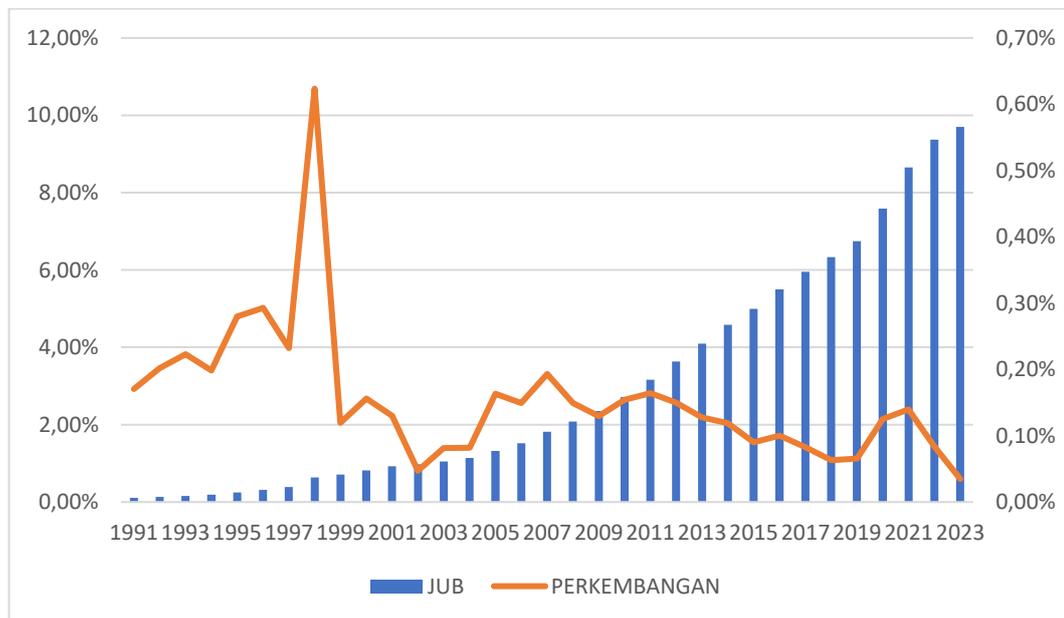
Memasuki periode pemulihan pasca-krisis, yakni tahun 1999–2007, jumlah uang beredar terus meningkat dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat, mencerminkan stabilisasi ekonomi nasional dan reformasi sektor keuangan. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih hati-hati, yang turut menjaga pertumbuhan JUB tetap terkendali. Peningkatan aktivitas ekspor dan masuknya arus modal asing secara perlahan juga memperkuat basis moneter Indonesia, meskipun sempat terjadi perlambatan pertumbuhan JUB pada tahun 2002 (hanya 5%) karena ketidakpastian politik dan ekonomi domestik.

Pada tahun 2008, krisis keuangan global memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Meski terjadi gejolak global, JUB tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 15% karena pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi dan mempertahankan permintaan domestik. Tahun 2009 hingga 2013 mencerminkan periode pemulihan yang solid, meskipun pertumbuhan JUB mulai menurun secara bertahap, dari 13% pada 2009 menjadi 13% pada 2013, seiring dengan upaya normalisasi kebijakan moneter dan meningkatnya efisiensi fiskal.

Periode 2014–2019 menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan jumlah uang beredar, di mana pertumbuhan tahunan menurun dari 12% pada 2014 menjadi hanya 7% pada 2019. Penurunan ini berkaitan dengan meningkatnya kehati-hatian moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, serta menurunnya tekanan inflasi selama periode tersebut.

Tahun 2020 menjadi masa krusial akibat pandemi COVID-19 yang mengguncang seluruh sektor ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia merespons krisis ini dengan kebijakan moneter yang sangat ekspansif, seperti pelonggaran suku bunga dan injeksi likuiditas besar-besaran ke sistem keuangan, yang menyebabkan jumlah uang beredar meningkat signifikan sebesar 13% pada 2020 dan 14% pada 2021. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelangsungan usaha di tengah pembatasan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, pada tahun 2022, pertumbuhan JUB menurun menjadi 8%, seiring dengan dimulainya normalisasi kebijakan moneter global dan domestik untuk mengatasi tekanan inflasi pasca-pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan jumlah uang beredar menurun lebih lanjut menjadi hanya 3%, mencerminkan transisi menuju kebijakan yang lebih ketat serta adanya pelambatan pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.



Gambar 5. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Uang Beredar 1991-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.1 dan Gambar 5.1, peningkatan jumlah uang beredar tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terlihat kecil secara nominal dalam persentase, angka ini

merupakan yang tertinggi selama periode observasi menurut data tabel. Lonjakan ini terjadi sebagai respons terhadap krisis moneter Asia tahun 1997–1998, di mana pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pada masa tersebut, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam, yang menyebabkan kenaikan nilai nominal uang beredar. Selain itu, terjadinya penarikan simpanan besar-besaran (*rush money*) oleh masyarakat meningkatkan kebutuhan akan likuiditas, sehingga mendorong pencetakan uang tambahan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah kepanikan yang lebih luas.

Sebaliknya, tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar terendah terjadi pada tahun 2023, yakni hanya sebesar 0,03%. Perlambatan ini terjadi karena pada periode tersebut pemerintah dan otoritas moneter mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter (*monetary tightening*) sebagai respons terhadap tekanan inflasi global dan proses normalisasi suku bunga. Selain itu, kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian pasca-pandemi COVID-19 turut mempengaruhi arus modal dan aktivitas ekonomi domestik. Kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dan investasi akibat ketidakpastian global juga berdampak pada melambatnya pertumbuhan permintaan uang di dalam negeri.

5.1.2 Perkembangan Suku Bunga (BI Rate) di Indonesia

Suku bunga BI Rate merupakan instrumen utama Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang beredar (JUB). Ketika BI Rate naik, suku bunga kredit ikut meningkat, sehingga masyarakat dan pelaku usaha cenderung menahan konsumsi dan investasi, yang berdampak pada penurunan jumlah uang beredar. Sebaliknya, penurunan BI Rate mendorong peningkatan kredit dan konsumsi, yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Dalam periode 2019-2023, penurunan BI Rate selama pandemi COVID-19 bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong likuiditas. Hal ini diikuti dengan meningkatnya jumlah uang beredar. Namun, ketika tekanan inflasi global meningkat, BI menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar kembali melambat. Perlu diketahui sejak 19 Agustus 2016, BI Rate telah digantikan oleh BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan resmi

Bank Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, digunakan data historis BI Rate hingga tahun 2016 untuk menjaga konsistensi analisis jangka panjang. Berikut adalah perkembangan suku bunga BI Rate dan jumlah uang beredar di Indonesia periode tahun 2019-2023:

Tabel 5. 2 Perkembangan Suku Bunga (BI Rate) di Indonesia (%)

Tahun	BI Rate	Perkembangan	Tahun	BI Rate	Perkembangan
1990	22.39	-	2008	9.25	0,16%
1991	18.7	-0,16%	2009	6.50	-0,30%
1992	13.17	-0,30%	2010	6.50	0,00%
1993	9.5	-0,28%	2011	6.00	-0,08%
1994	14.38	0,51%	2012	5.75	-0,04%
1995	14.75	0,03%	2013	7.50	0,30%
1996	12.88	-0,13%	2014	7.75	0,03%
1997	20	0,55%	2015	7.50	-0,03%
1998	38.44	0,92%	2016	6.50	-0,13%
1999	12.51	-0,67%	2017	4.25	-0,35%
2000	14.53	0,16%	2018	6.00	0,41%
2001	17.62	0,21%	2019	5.00	-0,17%
2002	12.93	-0,27%	2020	3.75	-0,25%
2003	8.31	-0,36%	2021	3.50	-0,07%
2004	5.92	-0,29%	2022	5.50	0,57%
2005	12.75	1,15%	2023	6.00	0,09%
2006	9.75	-0,24%	Rata-rata		0,03%
2007	8.00	-0,18%			

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perkembangan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) selama periode 1991 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan respons kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi domestik maupun global. Dalam tiga tahun, terjadi penurunan berturut-turut, masing-masing sebesar (-0,16%) pada 1991, -(0,30%) pada 1992, dan (-0,28%) pada 1993, mencerminkan upaya stabilisasi moneter pasca periode suku bunga tinggi.

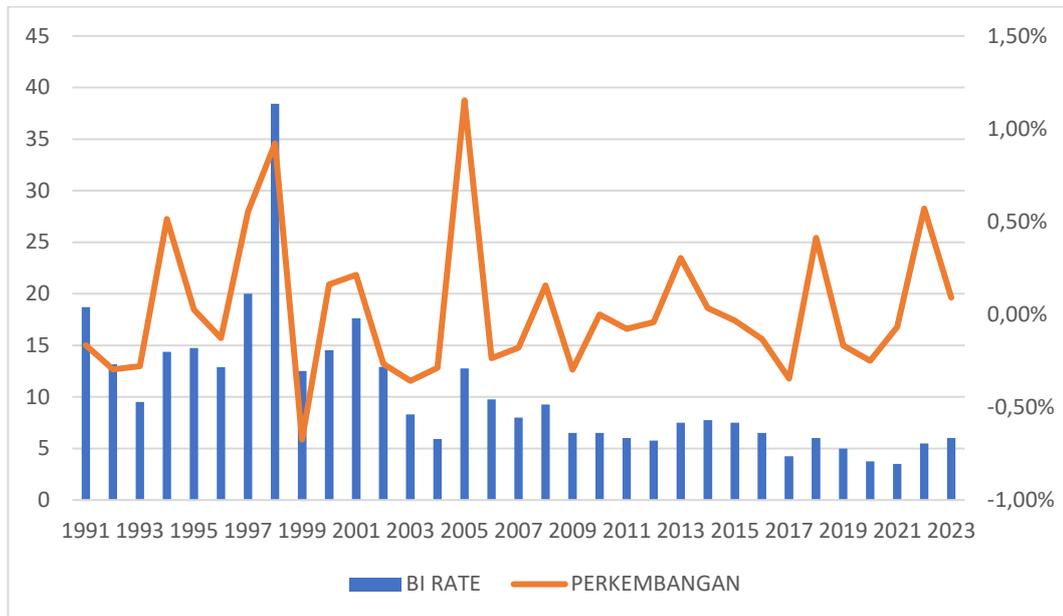
Namun demikian, pada tahun 1994 dan 1995, BI Rate kembali meningkat, masing-masing sebesar 0,51% dan 0,03%, pada tahun 1996 terjadi penurunan sebesar (-0,13%). Krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan 1998 mendorong lonjakan signifikan BI Rate, yaitu sebesar (0,55%) pada 1997 dan mencapai puncaknya sebesar (0,92%) pada 1998.

Memasuki tahun 1999, BI Rate mengalami penurunan tajam sebesar -0,67%, tren kenaikan kembali terjadi pada tahun 2000 dan 2001, masing-masing sebesar 0,16% dan 0,21%. Namun, periode 2002 hingga 2004 ditandai dengan penurunan berturut-turut, yakni (-0,27%) pada 2002, (-0,36%) pada 2003, dan (-0,29%) pada 2004.

Pada tahun 2005, BI Rate kembali meningkat secara signifikan sebesar 1,15% sebagai respons terhadap tekanan inflasi. Penurunan kembali terjadi dalam tiga tahun berikutnya, yaitu (-0,24%) pada 2006, (-0,18%) pada 2007, dan kenaikan moderat sebesar (0,16%) pada 2008. Tahun 2009 mencatatkan penurunan yang cukup tajam sebesar -0,30%.

Selama periode 2010-2019, BI Rate menunjukkan tren relatif stabil dengan kecenderungan menurun secara bertahap, mencapai 5,00% pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan kondisi makroekonomi yang relatif stabil serta kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga ini mendorong ekspansi moneter yang tercermin dari meningkatnya jumlah uang beredar.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada sektor keuangan yang mendorong pelonggaran moneter. Pada 2020, perkembangan BI Rate turun sebesar -0,25%, dan kembali menurun sebesar -0,07% pada 2021, merupakan titik terendah sepanjang periode pengamatan. Namun, pengetatan moneter kembali dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,57% dan 0,09%.



Gambar 5. 2 Grafik Perkembangan BI Rate 1991-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.2 dan Gambar 5.2, perubahan suku bunga acuan (BI Rate) tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 1,15%. Kenaikan ini merupakan bagian dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap tekanan inflasi dan gejolak nilai tukar akibat meningkatnya harga minyak dunia serta dampak dari perlambatan ekonomi global. Pada tahun tersebut, pemerintah juga sedang menghadapi dampak dari pencabutan subsidi BBM yang menyebabkan lonjakan harga-harga domestik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengendalikan ekspektasi inflasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dengan menaikkan suku bunga secara signifikan. Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat nilai tukar rupiah dan mencegah keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

Sementara itu, penurunan suku bunga tertajam terjadi pada tahun 1999, yakni sebesar -0,67%. Penurunan ini terjadi sebagai bagian dari langkah pemulihan pasca krisis moneter 1998, di mana Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi tajam. Stabilitas ekonomi yang perlahan mulai pulih serta menurunnya tekanan inflasi memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku

bunga guna mendorong aktivitas kredit dan investasi domestik. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan upaya untuk meredakan beban sektor riil dan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional pasca krisis.

5.1.3 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan umum dan terus-menerus pada tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli mata uang, sehingga setiap unit mata uang mampu membeli barang dan jasa yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Fenomena inflasi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang sangat penting untuk dianalisis karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat inflasi yang moderat dianggap normal dan bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif bagi konsumsi dan investasi. Namun, inflasi yang terlalu tinggi atau tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, mengganggu perencanaan bisnis dan rumah tangga, serta mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga dapat menandakan lemahnya permintaan agregat yang berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Faktor-faktor tersebut antara lain perubahan harga bahan pokok, fluktuasi nilai tukar rupiah, kebijakan moneter dan fiskal, serta kondisi eksternal seperti harga komoditas dunia dan gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia dan pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk pengaturan suku bunga, pengendalian harga, dan stabilisasi nilai tukar.

Tabel 5. 3 Perkembangan Inflasi di Indonesia (%)

Tahun	Inflasi	Perkembangan	Tahun	Inflasi	Perkembangan
1990	9.53	-	2008	3.13	0.68%
1991	9.52	0,00%	2009	2.72	-0.75%
1992	4.94	-0,48%	2010	1.68	1,50%
1993	9.77	0,98%	2011	1.87	-0,46%
1994	9.24	-0,05%	2012	5.51	0,13%
1995	8.64	-0,06%	2013	2.61	0,95%
1996	6.47	-0,25%	2014	3.13	0,00%
1997	11.05	0,71%	2015	2.72	-0,60%
1998	77.63	6,03%	2016	1.68	-0,10%
1999	2.01	-0,97%	2017	1.87	0,20%
2000	9.35	3,65%	2018	5.51	-0,13%
2001	12.55	0,34%	2019	2.61	-0,13%
2002	10.03	-0,20%	2020	3.13	-0,38%
2003	5.06	-0,50%	2021	2.72	0,11%
2004	6.40	0,26%	2022	1.68	1,95%
2005	17.11	1,67%	2023	1.87	-0,53%
2006	6.60	-0,61%	Rata-rata		0,39%
2007	6.59	0,00%			

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.3, dapat dilihat bahwa inflasi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 1991 hingga 2023 dengan rata-rata perkembangan tahunan sebesar sekitar 0,39%. Meskipun tidak menunjukkan pola yang sepenuhnya konsisten, perkembangan inflasi di Indonesia selama periode ini mencerminkan berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global yang mempengaruhi kestabilan harga barang dan jasa.

Pada periode 1991-1997, inflasi Indonesia cenderung tinggi namun relatif stabil, dengan rata-rata inflasi berkisar antara 0,01% hingga 0,71%. Puncaknya terjadi pada tahun 1993 dengan tingkat inflasi 0,98%. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi yang positif, serta fluktuasi harga pangan dan energi. Stabilitas ekonomi pada awal 1990-an disertai dengan kebijakan moneter yang belum sepenuhnya independen menyebabkan tekanan inflasi yang cukup tinggi namun masih terkendali.

Pada tahun 1998, terjadi lonjakan inflasi secara drastis hingga mencapai 6,03%, merupakan rekor tertinggi sepanjang periode pengamatan. Peningkatan ini disebabkan oleh krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada 1997-1998, yang menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi tajam, harga barang impor melonjak, dan kondisi sosial-politik memburuk. Krisis ini memicu hiperinflasi dan merusak daya beli masyarakat secara signifikan.

Setelah krisis, pada periode 1999-2005, inflasi mulai menurun meskipun masih menunjukkan fluktuasi. Tahun 1999 mencatat inflasi terendah pasca-krisis sebesar -0,97%, namun kembali naik pada tahun 2000 hingga 2005, terutama pada tahun 2005 (1,67%) akibat kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan lonjakan harga energi dan transportasi. Pemerintah saat itu berupaya melakukan reformasi fiskal untuk mengurangi beban anggaran negara, namun menimbulkan tekanan inflasi jangka pendek.

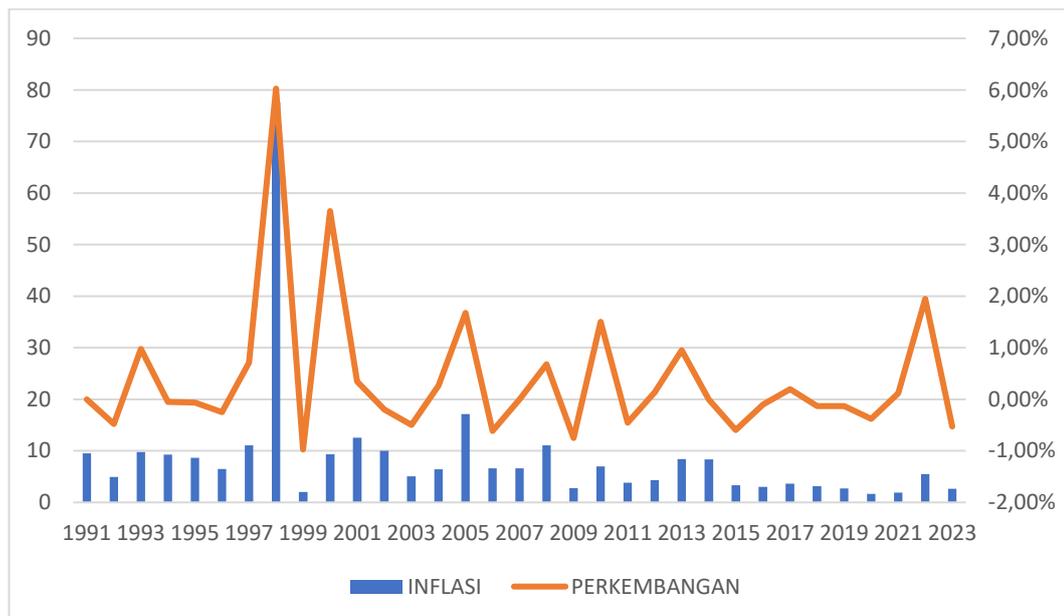
Pada periode 2006–2014, inflasi mulai menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan angka rata-rata di bawah 0,07%. Tahun 2008 dan 2009 menunjukkan inflasi relatif rendah, yaitu 0,68% dan -0,57%, meskipun dunia tengah dilanda krisis keuangan global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup mampu menjaga kestabilan harga melalui kebijakan moneter yang hati-hati dan koordinasi kebijakan fiskal.

Memasuki periode 2015-2019, inflasi di Indonesia berada pada tingkat yang lebih rendah dan stabil, umumnya berkisar antara -0,60% hingga -0,13%. Ini menunjukkan keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dalam rentang target yang ditetapkan. Rendahnya tekanan harga terutama dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar, penurunan harga komoditas global, serta penguatan koordinasi kebijakan pengendalian harga pangan dan energi.

Pada periode 2020-2023, inflasi kembali mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19 dan dampak globalnya. Tahun 2020 mencatat inflasi sebesar -0,38% di tengah perlambatan ekonomi. Pada tahun 2021 dan 2022, inflasi relatif rendah masing-masing sebesar 0,11% dan 1,95% akibat penurunan konsumsi domestik dan permintaan agregat. Namun, tahun 2023 mencatat perkembangan

inflasi sedikit meningkat menjadi -0,53%, dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, peningkatan permintaan, serta tekanan harga dari sisi global.

Secara keseluruhan, inflasi Indonesia selama periode 1990-2023 mengalami siklus naik turun yang dipengaruhi oleh krisis keuangan, fluktuasi harga komoditas, kebijakan fiskal dan moneter, serta faktor global lainnya



Gambar 5. 3 Grafik Perkembangan Inflasi 1991-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Gambar 5.3, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 6,03%. Lonjakan inflasi yang sangat tajam ini terjadi sebagai dampak langsung dari krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang sangat tajam, sehingga harga barang-barang impor meningkat drastis. Selain itu, ketidakstabilan politik, lemahnya sistem perbankan, dan melonjaknya biaya produksi turut memperparah kondisi. Krisis kepercayaan terhadap sektor keuangan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok menyebabkan inflasi melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengendalikan laju inflasi karena lemahnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Tingkat inflasi yang sangat tinggi ini berdampak luas terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi

nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar -0,97%. Penurunan inflasi yang sangat signifikan ini terjadi setelah lonjakan ekstrem pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 1999, Indonesia mulai memasuki fase awal pemulihan ekonomi pasca-krisis, dengan aktivitas ekonomi yang masih lemah dan daya beli masyarakat yang menurun. Pemerintah dan Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan moneter yang ketat guna menstabilkan harga dan nilai tukar. Selain itu, turunnya permintaan agregat akibat kontraksi ekonomi turut menekan laju inflasi. Penurunan tingkat inflasi ini mencerminkan berkurangnya tekanan harga di tengah proses pemulihan, namun juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih dari dampak krisis. Rendahnya inflasi pada tahun ini menjadi cerminan dari kehati-hatian dalam kebijakan ekonomi serta upaya menjaga stabilitas makroekonomi.

5.1.4 Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia (Rp/US\$)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan salah satu variabel ekonomi yang sangat krusial dalam menentukan dinamika jumlah uang beredar di Indonesia. Perubahan nilai tukar mencerminkan kondisi keseimbangan antara permintaan dan penawaran mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik domestik maupun global. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak langsung pada sektor perdagangan internasional, khususnya aktivitas ekspor dan impor, yang pada gilirannya memengaruhi likuiditas uang di pasar domestik. Selain itu, nilai tukar juga berperan penting dalam menentukan arus modal masuk dan keluar negara, yang dapat memengaruhi ketersediaan uang dalam perekonomian. Ketidakstabilan nilai tukar sering kali menyebabkan volatilitas harga barang dan jasa, khususnya barang impor, sehingga dapat memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan moneter dan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, analisis perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi aspek penting dalam memahami mekanisme penentu jumlah uang beredar di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis dan kondisi pasar keuangan domestik yang berkembang. Berikut perkembangan nilai tukar Indonesia periode 2019-2023 :

Tabel 5. 4 Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia (Rp/US\$)

Tahun	Nilai Tukar Rupiah	Perkembangan	Tahun	Nilai Tukar Rupiah	Perkembangan
1990	1.901		2008	10.950	0,16%
1991	1.992	0,05%	2009	9.400	-0,14%
1992	2.062	0,04%	2010	8.991	-0,04%
1993	2.110	0,02%	2011	9.068	0,01%
1994	2.200	0,04%	2012	9.670	0,07%
1995	2.308	0,05%	2013	12.189	0,26%
1996	2.383	0,03%	2014	12.440	0,02%
1997	4.650	0,95%	2015	13.795	0,11%
1998	8.025	0,73%	2016	13.436	-0,03%
1999	7.100	-0,12%	2017	13.548	0,01%
2000	9.595	0,35%	2018	14.481	0,07%
2001	10.400	0,08%	2019	13.901	-0,04%
2002	8.940	-0,14%	2020	14.105	0,01%
2003	8.465	-0,05%	2021	14.269	0,01%
2004	9.290	0,10%	2022	15.731	0,10%
2005	9.830	0,06%	2023	15.416	-0,02%
2006	9.020	-0,08%	Rata-rata		0,08%
2007	9.419	0,04%			

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

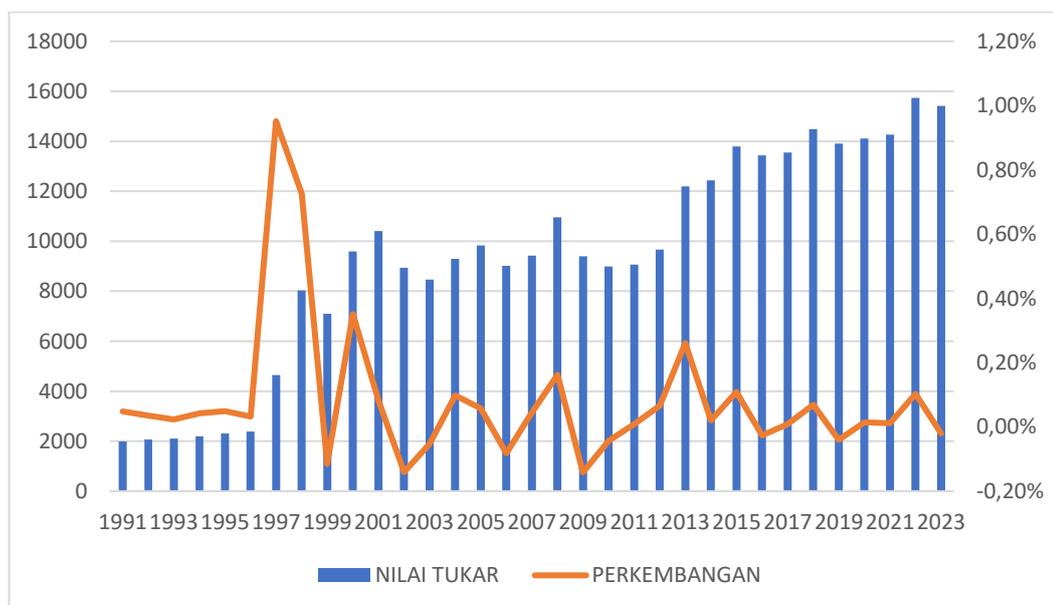
Berdasarkan Tabel 5.4, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 1991 hingga 2023, terlihat bahwa nilai tukar mengalami tren penguatan dan pelemahan yang cukup signifikan dengan rata-rata 0,8% pertahunnya. Pada awal dekade 1991-an, perkembangan nilai tukar rupiah berada di 0,05%, kemudian mengalami kenaikan secara bertahap setiap tahunnya dengan tingkat perkembangan yang relatif kecil, berkisar antara 0,01% hingga 0,05% hingga tahun 1996.

Namun, pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi lonjakan nilai tukar yang sangat tajam akibat krisis moneter Asia, di mana perkembangan nilai tukar rupiah melemah drastis dari sekitar (0,03%) pada tahun 1996 menjadi (0,95%) pada tahun 1997 dan semakin melemah pada tahun 1998 dengan tingkat perkembangan masing-masing sebesar 0,95% dan 0,73%. Pelemahan ini mengindikasikan gejala ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan finansial dan mempengaruhi jumlah uang beredar secara signifikan. Setelah krisis, nilai tukar rupiah mulai mengalami

penguatan kembali pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan awal dekade 1990-an. Perkembangan nilai tukar sempat menurun menjadi -0,12% pada tahun 1999 dan kemudian kembali melemah pada awal tahun 2000-an, mencapai (0,08%) pada tahun 2001. Pada rentang tahun 2002 hingga 2007, nilai tukar menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan perubahan minor, yang tercermin dari tingkat perkembangan yang kecil dan terkadang negatif.

Memasuki dekade 2010-an, nilai tukar rupiah kembali mengalami peningkatan pelemahan, terlihat dari pertumbuhan nilai tukar dari (-0,04%) pada tahun 2010 menjadi 0,11% pada tahun 2015. Pada periode ini, fluktuasi nilai tukar masih tergolong cukup volatil, dengan pertumbuhan nilai tukar mencapai 0,26% pada tahun 2013, yang mencerminkan tekanan eksternal dan domestik pada perekonomian Indonesia.

Pada tahun-tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2023, nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren pelemahan meskipun dengan tingkat perkembangan yang kecil, dari 0,01% pada tahun 2020 menjadi -0,02% pada tahun 2023. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan moneter negara maju.



Gambar 5. 4 Grafik Perkembangan Nilai Tukar 1991-2023

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.4 dan Gambar 5.4, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang paling signifikan terjadi pada tahun 1998, dengan nilai tukar mencapai 6,03%. Hal ini disebabkan oleh krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, yang mengakibatkan gejolak ekonomi dan tekanan besar pada stabilitas nilai tukar. Krisis tersebut menyebabkan pelemahan mata uang yang tajam akibat arus modal keluar yang masif, penurunan kepercayaan investor, dan ketidakstabilan sistem keuangan domestik. Kondisi ini memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah darurat guna menstabilkan perekonomian, meskipun pada saat itu nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan berat.

Pada tahun 2010, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan tren penguatan relatif dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tukar tercatat berada di kisaran 1,50%, menandai stabilisasi setelah periode volatilitas akibat krisis keuangan global pada 2008–2009. Penguatan nilai tukar tersebut didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian global yang meningkatkan permintaan terhadap ekspor Indonesia, serta masuknya arus modal asing ke dalam negeri yang memperkuat cadangan devisa nasional. Selain itu, kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Indonesia turut menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Perkembangan ini mencerminkan peran nilai tukar sebagai salah satu indikator penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca krisis.

5.1.5 Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur total nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB mencerminkan kinerja ekonomi secara menyeluruh dan menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik di sektor fiskal maupun moneter. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan PDB yang stabil dan berkelanjutan mencerminkan efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDB atas dasar harga konstan (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan riil ekonomi tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan

ekonomi dari waktu ke waktu. Peningkatan PDB menunjukkan ekspansi ekonomi, peningkatan investasi, konsumsi, dan produktivitas, yang dapat mendorong peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Sebaliknya, perlambatan atau kontraksi PDB bisa menjadi sinyal penurunan aktivitas ekonomi yang dapat berdampak pada stabilitas moneter dan fiskal. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tren pertumbuhan PDB sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan serta arah perekonomian nasional ke depan. Berikut disajikan data perkembangan PDB (ADHK) Indonesia selama periode tahun 1991 hingga 2023 :

Tabel 5. 5 Perkembangan Produk Domestik Bruto (ADHK) di Indonesia

Tahun	PDB (ADHK)	Perkembangan	Tahun	PDB (ADHK)	Perkembangan
1990	115.217,30	-	2008	2.082.456,10	0,06%
1991	123.225,20	0,07%	2009	2.178.850,40	0,05%
1992	259.884,50	1,11%	2010	2.314.458,80	0,06%
1993	329.775,80	0,27%	2011	2.464.566,10	0,06%
1994	354.640,80	0,08%	2012	2.618.932,0	0,06%
1995	383.792,30	0,08%	2013	2.769.053,0	0,06%
1996	413.797,90	0,08%	2014	2.909.181,50	0,05%
1997	433.245,90	0,05%	2015	8.982.517,10	2,09%
1998	376.374,90	-0,13%	2016	9.434.613,40	0,05%
1999	379.352,50	0,01%	2017	9.912.928,10	0,05%
2000	1.389.769,90	2,66%	2018	10.425.851,90	0,05%
2001	1.440.405,30	0,04%	2019	10.949.155,40	0,05%
2002	1.505.216,0	0,04%	2020	10.722.999,30	-0,02%
2003	1.577.171,30	0,05%	2021	11.120.059,70	0,04%
2004	1.656.516,80	0,05%	2022	11.710.247,90	0,05%
2005	1.750.815,20	0,06%	2023	12.301.393,60	0,05%
2006	1.847.126,70	0,06%	Rata-rata		0,08%
2007	1.964.327,30	0,06%			

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dilihat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung mengalami peningkatan dari tahun 1991 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang stabil. Pertumbuhan PDB menggambarkan kinerja ekonomi riil dan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kapasitas dan kesehatan perekonomian suatu negara.

Pada periode 1991-1996, PDB Indonesia mengalami tren pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1992 dengan pertumbuhan mencapai 1,11%. Kenaikan tajam ini terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan statistik atau kemungkinan perubahan basis data ekonomi nasional. Di samping itu, kondisi ekonomi Indonesia di awal 1990-an cukup kuat dengan pertumbuhan sektor industri dan ekspor yang positif. Stabilitas politik dan kebijakan pembangunan infrastruktur juga turut mendorong pertumbuhan PDB dalam periode ini.

Namun, memasuki periode krisis ekonomi 1997-1998, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Puncaknya pada tahun 1998, saat PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar -0,13% dibanding tahun sebelumnya. Krisis moneter Asia yang dimulai dari Thailand menyebar ke Indonesia dan menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah, melonjaknya inflasi, dan keruntuhan sektor perbankan. Situasi ini berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi riil, yang menyebabkan pertumbuhan PDB menurun drastis.

Setelah krisis, pada periode 1999-2007, PDB mulai pulih dan menunjukkan pertumbuhan positif kembali. Tahun 2000 mencatatkan lonjakan besar sebesar 2,66%, yang kemungkinan juga disebabkan oleh revisi metode perhitungan statistik nasional atau revaluasi PDB. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi kembali stabil pada kisaran 0,04%-0,06% per tahun. Periode ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural, stabilitas makroekonomi, dan meningkatnya investasi asing.

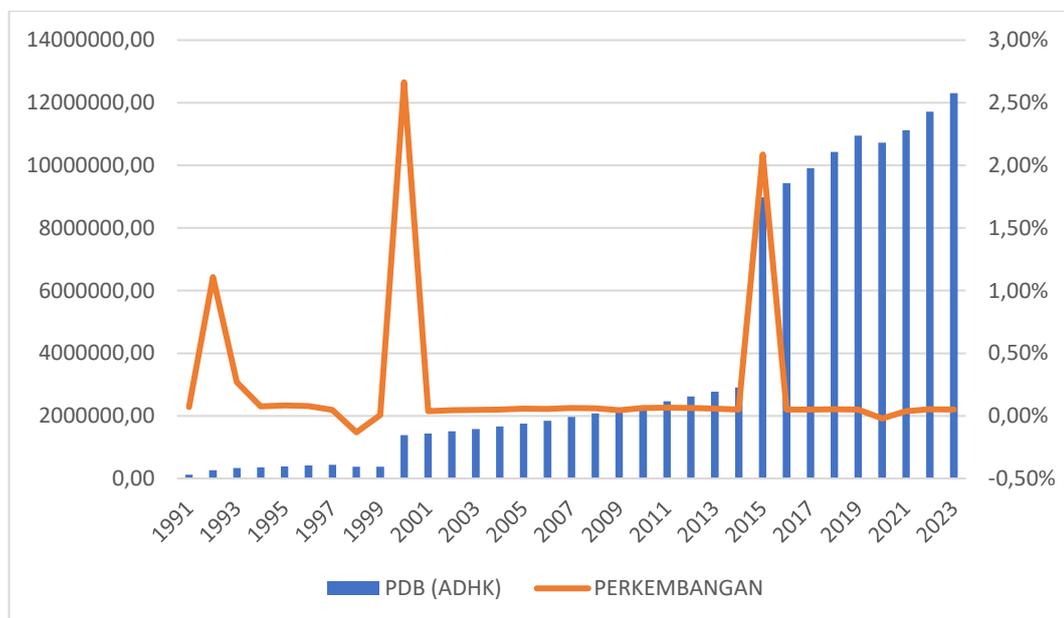
Pada periode krisis keuangan global tahun 2008-2009, PDB Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 0,06% per tahun, meskipun terjadi perlambatan di beberapa sektor ekspor dan industri. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan global, berkat kebijakan fiskal dan moneter yang responsif serta pasar domestik yang kuat.

Selanjutnya, periode 2010-2019 ditandai dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 0,05%-0,06% per tahun. Peningkatan tersebut didorong oleh program percepatan pembangunan infrastruktur nasional, perbaikan iklim investasi, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Tahun 2015 mencatatkan

lonjakan PDB sebesar 2,09%, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari perubahan basis data ekonomi nasional (*rebasings*) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Memasuki periode pandemi COVID-19 (2020–2021), pertumbuhan PDB Indonesia sempat mengalami kontraksi, terutama pada tahun 2020 yang mencatatkan penurunan sebesar -0,02%. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial yang memukul sektor konsumsi, pariwisata, dan investasi. Namun, pada 2021-2023, PDB kembali tumbuh dengan stabil pada kisaran 0.04%-0,05%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup solid pasca-pandemi, didorong oleh vaksinasi massal, peningkatan mobilitas masyarakat, dan stimulus fiskal pemerintah.

Dengan demikian, secara keseluruhan, perkembangan PDB Indonesia selama periode 1991-2023 menunjukkan pola pertumbuhan yang kuat meskipun sempat terganggu oleh krisis finansial regional dan global. Pola ini mencerminkan ketahanan struktural ekonomi Indonesia sekaligus pentingnya reformasi kebijakan dan manajemen krisis yang responsif dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 5. 5 Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto 1991-2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 5.4 dan Gambar 5.4, pertumbuhan PDB (ADHK) tertinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar 2,66%. Lompatan besar ini merupakan dampak dari pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1997-1998, yang mulai menunjukkan hasil signifikan pada awal dekade 2000-an. Pemerintah Indonesia saat itu menjalankan berbagai program restrukturisasi ekonomi dan sektor keuangan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Reformasi struktural, stabilisasi fiskal, serta peningkatan ekspor seiring dengan membaiknya kondisi global turut mendorong akselerasi pertumbuhan PDB. Momentum ini juga mencerminkan pemulihan sektor-sektor produktif dan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Sebaliknya, kontraksi atau penurunan pertumbuhan PDB terdalam terjadi pada tahun 1998 sebesar -0,13%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari krisis moneter Asia yang memuncak pada akhir 1997 dan sangat memukul perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, dan banyak sektor usaha kolaps, menyebabkan PDB riil Indonesia mengalami kemerosotan tajam. Krisis ini tidak hanya menimbulkan tekanan pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat serta melemahnya konsumsi dan investasi domestik. Keadaan tersebut mencerminkan kerentanan struktur ekonomi Indonesia saat menghadapi gejolak eksternal yang kuat.

Pergerakan PDB pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif stabil, umumnya berada dalam kisaran 0,04% hingga 0,06% per tahun. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Pada tahun 2015, juga tercatat pertumbuhan yang tinggi sebesar 2,09%, yang mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam kegiatan ekonomi nasional, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan pada masa tersebut.

5.2 Pengaruh Jumlah Uang Beredar di Indonesia Terhadap Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang dengan Menggunakan Pendekatan Model ECM

5.2.1 Estimasi ECM (*Error Correction Model*)

Sebelum dilakukan regresi dengan uji ECM (*Error Correction Model*) dalam menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan uji stasioner.

1. Uji Stasioner Data (*Unit Root Test*)

Pengetesan kestasioneritasan data didalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memeriksa akar-akar unit (*unit root test*) dari masing-masing data variabel penelitian. Terdapat beberapa tahapan dalam pengujian stasioneritas data ini. Metode yang digunakan pada tahap pengujian stasioneritas data penelitian ini adalah dengan tes Augmented Dickey Fuller (*ADF*) dengan bantuan software Eviews 9.

Tabel 5. 6 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller Pada Tingkat Level

Variabel	Nilai <i>ADF Test Statistic</i>	Probabilitas	Keterangan
JUB	0.874608	0.8926	Tidak Stasioner
SB	-1.377504	0.1523	Tidak Stasioner
INF	-0.840542	0.3421	Tidak stasioner
KURS	1.403329	0.9568	Tidak Stasioner
PDB	1.669700	0.9743	Tidak Stasioner

Sumber : Hasil olahan data EViews 10, 2025

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui variabel jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan produk domestic bruto tidak stasioner pada tingkat level karena

probabilitasnya lebih besar dari 0.05, karena semua variabel belum stasioner pada tingkat level maka dilanjutkan dengan uji pada tingkat *first difference*.

2. Uji Akar Unit Tingkat *First Difference*

Tabel 5. 7 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller Pada Tingkat First Difference

Variabel	Nilai ADF Test Statistic	Probabilitas	Keterangan
JUB	1.826357	0.9810	Tidak Stasioner
SB	-3.211674	0.0024	Stasioner
INF	-3.347984	0.0017	Stasioner
KURS	-5.083383	0.0000	Stasioner
PDB	-4.812542	0.0000	Stasioner

Sumber : Hasil olahan data EViews 10, 2025

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa variabel suku bunga, inflasi, dan produk domestik bruto stasioner pada *first difference* karena probabilitasnya lebih kecil dari 0.05, tetapi data jumlah uang beredar tidak stasioner karena lebih besar 0.05, maka dari itu dilanjutkan dengan uji pada *second difference*.

3. Uji Akar Unir Tingkat *Second Difference*

Tabel 5. 8 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller Pada Tingkat Second Difference

Variabel	Nilai ADF Test Statistic	Probabilitas	Keterangan
JUB	-4.965555	0.0000	Stasioner
SBI	-5.178953	0.0000	Stasioner
INF	-5.894155	0.0000	Stasioner
KURS	-7.401003	0.0000	Stasioner
PDB	-9.320591	0.0000	Stasioner

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa semua variabel diatas telah stasioner pada tingkat *second difference*, karena probabilitanya lebih kecil 0.05. Karena semua variabel sudah stasioner pada tingkat *second difference*, maka dapat dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.

4. Uji Kointegrasi

Setelah semua variabel lolos uji stasioneritas, maka dilakukan uji kointegrasi untuk menilai apakah perilaku jangka panjang data penelitian terkointegrasi ataupun tidak. Uji kointegrasi ini juga terlihat apakah model ECM bisa dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian. Hasil uji kointegrasi ini juga bisa dicapai dengan memanfaatkan teknik Ordinary Least Square (OLS) dimana residu harus stasioner pada tingkat 5% agar kointegrasi bisa dipertahankan.

Tabel 5. 9 Hasil Uji ECT pada tingkat level

Augmented Dickey-Fuller test statistic		t-statistik	Probabilitas
		-2.676529	0.0091
Test critical values	1% level	-2.639210	
	5% level	-1.951687	
	10% level	-1.610579	

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan, ditemukan residual regresi (ECT) stasioner pada tingkat level, dimana probabilitas ECT itu signifikan, dengan probabilitas 0.02 yang man lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner pada Tingkat 5% dan ECM dapat digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian.

5. Estimasi Jangka Panjang

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dilakukan estimasi model ECM. Berikut merupakan hasil model ECM dalam jangka panjang yang dilakukan dengan melakukan estimasi menggunakan regresi OLS, yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Hasil Estimasi Regresi Persamaan Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
C	-0.014300	1.063344	-0.013448	0.9894
INF	0.016320	0.008954	1.822655	0.0791
LOG(KURS)	0.762289	0.176482	4.319362	0.0002
LOG(PDB)	0.530676	0.109549	4.844190	0.0000
SBI	-0.046400	0.021811	-2.127312	0.0423
Adjusted R-squared	0.956477			
F-statistic	176.8095			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Dari hasil pengolahan data tabel 5.5, maka model yang terbentuk yakni sebagai berikut :

$$\text{JUB}_t = -0.014300 - 0.046400\text{SBI}_t + 0.016320\text{INF} + 0.762289\text{KURS} + 0.530676\text{PDB} + \text{et}$$

1. Nilai Konstanta sebesar -0.014300 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (INF, KURS, PDB, SBI) diasumsikan bernilai nol atau tidak berubah, maka nilai variabel dependen (jumlah uang beredar atau cadangan devisa, tergantung konteks penelitian) diperkirakan sebesar -0.014300. Namun, karena nilai konstanta tidak signifikan (Prob = 0.9894), maka tidak memiliki pengaruh yang berarti secara statistik.
2. Variabel memiliki koefisien regresi sebesar 0.016320. Artinya, setiap kenaikan 1 persen inflasi akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.01632 satuan log, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun demikian, nilai probabilitas sebesar 0.0791 (> 0.05) menunjukkan bahwa pengaruh ini

tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%, meskipun mendekati signifikan pada tingkat signifikansi 10%.

3. Variabel Nilai Tukar mempunyai koefisien regresi sebesar 0.762289 yang signifikan (Prob = 0.0002). Ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai tukar sebesar 1% akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.762289 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang.
4. Variabel Produk Domestik Bruto memiliki koefisien regresi sebesar 0.530676 dan signifikan secara statistik (Prob = 0.0000). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1% akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.530676%, dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar.
5. Variabel Suku Bunga memiliki koefisien regresi sebesar -0.046400 dan signifikan (Prob = 0.0423). Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan jumlah uang beredar sebesar 0.046400 satuan log. Artinya, suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang.
6. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.956477 menunjukkan bahwa sebesar 95.65% variasi dalam jumlah uang beredar dapat dijelaskan oleh variasi dalam keempat variabel independen (INF, nilai tukar, PDB, dan SBI) dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat baik.

6. Estimasi Jangka Pendek (ECM)

Untuk mengetahui bagaimana suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek, dilakukan estimasi model ECM. Berikut merupakan hasil model ECM dalam jangka pendek yang dilakukan dengan melakukan estimasi menggunakan regresi OLS, yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Hasil Estimasi Regresi Persamaan Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
C	0.128893	0.015229	8.463720	0.0000
D(INF)	0.003729	0.001711	2.179445	0.0385
D(LOG(KURS))	0.244408	0.105417	2.318496	0.0285
D(LOG(PDB))	-0.045486	0.041471	-1.096829	0.2828
D(SBI)	-0.008168	0.005471	-1.492956	0.1475
ECT(-1)	0.016052	0.054826	0.292778	0.7720
Adjusted R-squared	0.362722			
F-statistic	4.528878			
Prob(F-statistic)	0.004209			

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.9, maka model yang terbentuk yakni sebagai berikut :

$$\mathbf{JUB_t = 0.128893 - 0.008168SBI_t + 0.003729INF_t + 0.244408KURSt - 0.045486PDB_t + 0.016052ECT_{t-1}}$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi jangka pendek tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 0.128893 dan signifikan secara statistik (Prob = 0.0000). Artinya, jika seluruh variabel independen diasumsikan tidak berubah, maka perubahan jumlah uang beredar 0.128893 dalam satu periode.
2. Variabel Inflasi memiliki koefisien sebesar 0.003729 dengan probabilitas 0.0385 (< 0.05), yang berarti signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1

persen dalam jangka pendek akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.003729, dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Variabel Nilai Tukar memiliki koefisien sebesar 0.244408 dan signifikan secara statistik (Prob = 0.0285). Artinya, setiap kenaikan nilai tukar sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.244408 persen dalam jangka pendek, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari nilai tukar terhadap jumlah uang beredar.
4. Variabel Produk Domestik Bruto memiliki koefisien sebesar -0.045486 dengan (Prob = 0.2828), menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Meskipun koefisiennya negatif, hasil ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh PDB terhadap jumlah uang beredar secara meyakinkan dalam jangka pendek.
5. Variabel Suku Bunga (SBI) memiliki koefisien -0.008168 dan tidak signifikan secara statistik (Prob = 0.1475). Artinya, meskipun secara teori memiliki pengaruh negatif, pengaruh suku bunga terhadap jumlah uang beredar tidak terbukti secara statistik dalam jangka pendek

7. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji secara menyeluruh dan bersama-sama apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Tabel 5. 12 Uji Statistik Jangka Panjang

F-Statistik	176.8095
Prob (F-Satistik)	0.000000

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Dari data diatas, nilai F-statistik sebesar 176.8095 dengan probabilita 0.000000 atau kecil dari 0.05. Maka keputusannya H0 ditolak dan Ha diterima, dan dapat disimpulkan dalam jangka panjang suku bunga, inflasi, nilai tukar dan produk domestic bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar.

Tabel 5. 13 Uji F Statistik Jangka Pendek

F-Statistik	4.528878
Prob (F-Statistik)	0.004209

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Dari data diatas, nilai F-statistik sebesar 6.978304 dengan probabilita 0.000498 atau kecil dari 0.05. Maka keputusannya H0 ditolak dan Ha diterima, dan dapat disimpulkan dalam jangka pendek suku bunga, inflasi, nilai tukar dan produk domestic bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar.

8. Uji t

Uji t digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji secara individu apakah setiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan dengan ketentuan jika nilai prob t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $\alpha = 5\%$.

Tabel 5. 14 Uji t Statistik Jangka Panjang

Variabel	t-Statistik	Prob	Keterangan
INF	1.822655	0.0791	Tidak Signifikan
KURS	4.319362	0.0002	Stasioner
PDB	4.844190	0.0000	Stasioner
SBI	-2.127312	0.0423	Stasioner

Sumber : Hasil Olahan data EIEWS 10, 2025

Berdasarkan tabel 5.9, menunjukkan hasil uji t statistik, yaitu untuk melihat pengaruh secara parsial pada setiap variabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ yakni sebagai berikut :

1. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel inflasi (INF) sebesar $0.0791 > 0.05$ dengan t-statistik 1.822655, yang artinya secara parsial variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai t-statistik variabel nilai tukar sebesar $0.0002 < 0.05$ dengan t-statistik 4.319362, yang artinya secara parsial variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel Produk Domestik Bruto sebesar $0.0000 < 0.05$ dengan t-statistik 4.841490, yang artinya secara parsial variabel PDB berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.
4. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel Suku Bunga (SBI) sebesar $0.0423 < 0.05$ dengan t-statistik -2.127312, yang artinya secara parsial variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.

9. Uji t Statistik Jangka Pendek

Tabel 5. 15 Uji t Statistik Jangka Pendek

Variabel	t- Statistik	Prob	Keterangan
INF	2.179445	0.0385	Stasioner
KURS	2.318496	0.0285	Stasioner
PDB	-1.096829	0.2828	Tidak Stasioner
SBI	-1.492956	0.1475	Tidak Stasioner

Sumber : Hasil Olahan data eviews 10, 2025

Berdasarkan Tabel 5.10 menunjukkan hasil uji t statistik , yaitu untuk melihat pengaruh secara parsial pada setiap variabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, yakni sebagai berikut:

1. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai probabilitas (prob) t-statistik variabel inflasi sebesar $0.0385 < 0.05$ dengan t-statistik 2.179445, yang artinya secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai prob t-statistik variabel nilai tukar sebesar $0.0285 < 0.05$ dengan t-statistik 2.318496, yang artinya secara parsial variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai prob t-statistik variabel Produk Domestik Bruto sebesar $0.2828 > 0.05$ dengan t-statistik -1.096829, yang artinya secara parsial variabel PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai prob t-statistik variabel Suku Bunga sebesar $0.1475 > 0.05$ dengan t-statistik -1.492956 , yang artinya secara parsial variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek selama periode penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah H_0 diterima dan H_a ditolak.

10. Koefisien Determinan (R²)

Tabel 5. 16 Koefisien Determinasi Jangka Panjang

Adjusted R-squared	0.956477
---------------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh besarnya nilai koefisien determinan (R-squared) jangka panjang adalah 0.956477. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto) terhadap variabel dependen (jumlah uang beredar) dalam jangka panjang adalah sebesar 95 persen. Artinya suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto, memiliki persentase pengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia sebesar 95 persen, sedangkan sisanya 5 persen dipengaruhi oleh variabel di luar model regresi yang diteliti.

11. Koefisien Determinan Jangka Pendek

Tabel 5. 17 Koefisien Determinasi Jangka Pendek

Adjusted R-squared	0.362722
---------------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh besarnya nilai koefisien determinan (R-squared) jangka pendek adalah 0.362722. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto) terhadap variabel dependen (jumlah uang beredar) dalam jangka panjang adalah sebesar 36 persen. Artinya suku bunga, inflasi, nilai tukar,

dan produk domestik bruto, memiliki persentase pengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia sebesar 36 persen, sedangkan sisanya 64 persen dipengaruhi oleh variabel di luar model regresi yang diteliti.

12. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai uji Jaeque-Bera (JB Test).

Tabel 5. 18 Uji Normalitas

<i>Jaeque-Bera</i>	Probability	Keterangan
2.035320	0.361440	Normal

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Jaeque-Bera senilai 0.280668 dengan Prob 2.035320 dimana nilai prob lebih besar dari 0.05. maka model dalam penelitian yang dipakai dikatakan berdistribusi normal karena nilai probnya lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.361440

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. 19 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan memakai metode variance inflationary factor (VIF). Berikut hasil dari multikolinieritas.

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Ceentered VIF
C	0.000232	1.699766	NA
INF	2.93E-06	7.193416	7.192415
KURS	0.011113	2.658757	2.325719
PDB	0.001720	1.444089	1.183234
SBI	2.99E-05	8.806022	8.771470

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Dari hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai centered VIF untuk INF sebesar 7.192415, KURS sebesar 2.325719, PDB sebesar 1.183234, dan SBI sebesar 8.771470. Terlihat bahwa seluruh nilai centered VIF < 10, maka pada tahap uji ini bisa dikatakan bahwa model dalam penelitian tidak terindikasi masalah multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan memakai metode white heteroscedasticity. Berikut hasil uji heterokedastisitas.

Tabel 5. 20 Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.993582	Prob. F(20,11)	0.5254
Obs*R-squared	20.59795	Prob. Chi-Square(20)	0.4211
Scaled explained SS	8.168930	Prob. Chi-Square(20)	0.9907

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Uji ini dilihat melalui Prob. Chi-Square untuk Obs*R-Squared yaitu senilai 0.4211 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa model penelitian tidak terindikasi masalah heterokedastisitas.

13. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan memakai uji Breusch-Godfr. Berikut hasil uji autokorelasi.

Tabel 5. 21 Uji Autokorelasi

F-statistic	1.970568	Prob. F(2,25)	0.1604
Obs*R-squared	4.357685	Prob. Chi-Square(2)	0.1132

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 10, 2025

Hasil dari uji autokorelasi diatas diperoleh nilai Prob. Chi-Square senilai 0.1132 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan demikian bahwasanya model dalam penelitian tidak terindikasi masalah autokorelasi.

5.3 Analisa Ekonomi

5.3.1 Pengaruh Suku Bunga terhadap Jumlah Uang Beredar

Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, variabel inflasi memiliki koefisien sebesar 0.016320 dengan nilai probabilitas 0.0791. Ini berarti bahwa secara ekonomi, kenaikan inflasi sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.01632%, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun secara statistik, pengaruh inflasi terhadap jumlah uang beredar tidak signifikan pada taraf 5%, tetapi mendekati signifikan pada taraf 10%. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, meskipun arah pengaruhnya sesuai teori, hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar belum cukup kuat secara statistik. Secara ekonomi, inflasi yang meningkat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi. Ini akan meningkatkan permintaan uang dan memperluas jumlah uang beredar, terutama dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, bank sentral biasanya akan merespons inflasi dengan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga, yang pada akhirnya dapat menahan pertumbuhan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, meskipun hubungan inflasi dan uang beredar bersifat positif, kekuatan hubungan ini dalam jangka panjang dapat melemah karena intervensi kebijakan.

Dalam jangka pendek, inflasi memiliki koefisien sebesar 0.003729 dengan nilai probabilitas 0.0385. Artinya, dalam jangka pendek, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Ini sesuai dengan teori kuantitas uang ($MV = PY$), di mana kenaikan harga-harga mendorong kebutuhan uang untuk transaksi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sancaya & Wenagama, (2019) yang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia dalam jangka panjang. Demikian pula, Amanah et al., (2019) juga menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga menyebabkan penurunan

pertumbuhan uang beredar sebagai bentuk transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga.

5.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Uang Beredar

Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, variabel inflasi memiliki koefisien sebesar 0.016320 dengan nilai probabilitas 0.0791. Ini berarti bahwa secara ekonomi, kenaikan inflasi sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.01632%, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun secara statistik, pengaruh inflasi terhadap jumlah uang beredar tidak signifikan pada taraf 5%, tetapi mendekati signifikan pada taraf 10%. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, meskipun arah pengaruhnya sesuai teori, hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar belum cukup kuat secara statistik.

Secara ekonomi, inflasi yang meningkat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi. Ini akan meningkatkan permintaan uang dan memperluas jumlah uang beredar, terutama dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, bank sentral biasanya akan merespons inflasi dengan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga, yang pada akhirnya dapat menahan pertumbuhan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, meskipun hubungan inflasi dan uang beredar bersifat positif, kekuatan hubungan ini dalam jangka panjang dapat melemah karena intervensi kebijakan.

Dalam jangka pendek, inflasi memiliki koefisien sebesar 0.003729 dengan nilai probabilitas 0.0385. Artinya, dalam jangka pendek, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Ini sesuai dengan teori kuantitas uang ($MV = PY$), di mana kenaikan harga-harga mendorong kebutuhan uang untuk transaksi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Amanah et al., (2019) yang menemukan bahwa inflasi berdampak positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa inflasi mendorong kenaikan jumlah uang beredar, terutama dalam jangka pendek.

5.3.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Jumlah Uang Beredar

Dalam jangka panjang, nilai tukar (log kurs) menunjukkan koefisien sebesar 0.762289 dengan tingkat signifikansi tinggi (Prob = 0.0002). Artinya, setiap pelemahan nilai tukar (depresiasi rupiah) sebesar 1% akan meningkatkan jumlah uang beredar sebesar 0.762289%. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang. Pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor naik dan dapat mendorong inflasi, yang kemudian memicu peningkatan permintaan uang. Selain itu, depresiasi dapat meningkatkan ekspor yang membutuhkan likuiditas lebih besar.

Secara ekonomi, nilai tukar memengaruhi jumlah uang beredar melalui jalur perdagangan dan arus modal. Ketika terjadi depresiasi rupiah, harga barang impor naik sehingga mendorong inflasi dan meningkatkan kebutuhan uang untuk transaksi. Di sisi lain, peningkatan ekspor akibat kurs yang lebih kompetitif juga memicu peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan uang. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, otoritas moneter mungkin perlu menambah suplai uang dalam sistem keuangan. Karena itulah, depresiasi rupiah dapat memperbesar jumlah uang beredar, baik karena inflasi maupun karena aktivitas ekspor yang meningkat.

Dalam jangka pendek, koefisien nilai tukar sebesar 0.244408 (Prob = 0.0285) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini berarti efek depresiasi langsung tercermin dalam peningkatan jumlah uang beredar secara cepat. Hasil ini konsisten dengan temuan Putra dan Susanto (2020) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap likuiditas ekonomi. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa pergerakan kurs merupakan salah satu saluran penting transmisi kebijakan moneter terhadap jumlah uang beredar

5.3.4 Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Jumlah Uang Beredar

Pada jangka panjang, koefisien log PDB sebesar 0.530676 dengan nilai probabilitas 0.0000 menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Secara ekonomi, ini berarti peningkatan aktivitas ekonomi sebesar 1% akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar sebesar 0.530676%. Temuan ini sejalan dengan teori permintaan uang Keynesian, yang menyatakan bahwa ketika PDB meningkat, kebutuhan uang untuk transaksi juga

meningkat, sehingga jumlah uang beredar ikut bertambah. Secara ekonomi, PDB mencerminkan total output dan konsumsi dalam suatu negara. Saat ekonomi tumbuh, permintaan uang untuk keperluan produksi, distribusi, dan konsumsi juga meningkat. Hal ini memperluas kebutuhan akan uang tunai maupun giral dalam perekonomian. Oleh karena itu, jumlah uang beredar cenderung meningkat mengikuti pertumbuhan PDB dalam jangka panjang.

Namun dalam jangka pendek, variabel log PDB memiliki koefisien - 0.045486 dan tidak signifikan (Prob = 0.2828). Artinya, dalam jangka pendek, perubahan PDB tidak secara langsung mempengaruhi jumlah uang beredar secara signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya lag time (keterlambatan) dalam respons jumlah uang beredar terhadap perubahan output ekonomi atau karena peran sektor informal dan digital yang belum tercermin sepenuhnya dalam data PDB. Hasil jangka panjang ini konsisten dengan penelitian Sabbahatul Khairiati, (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah uang beredar.